



BADAN PUSAT STATISIK

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

BIRO KEUANGAN 2023



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Biro Keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Biro Keuangan sebagai salah satu unit kerja eselon II instansi di BPS atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan dalam rangka mencapai sasaran/target di lingkup Biro Keuangan yang telah ditetapkan. Tujuan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan kepada Biro Keuangan.

Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja Biro Keuangan terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023, capaian kinerja Biro Keuangan terhadap target Renstra Biro Keuangan 2020-2024, serta penyerapan anggaran Biro Keuangan Tahun Anggaran 2023. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi Biro Keuangan BPS untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah memberikan partisipasinya terhadap penyusunan laporan ini, kami mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini di masa mendatang sangat kami hargai.

Jakarta, 12 Februari 2024

BADAN PUSAT STATISTIK

Kepala Biro Keuangan,



Darusman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	6
RINGKASAN EKSEKUTIF	7
BAB I - PENDAHULUAN	9
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi	10
1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran	12
1.4. Potensi dan Permasalahan	18
1.5. Sistematika Penyajian	20
BAB II - PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Biro Keuangan	21
2.2 Rencana Strategis (Renstra)	23
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	25
BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023	26
SS.1. Terwujudnya Layanan Administrasi keuangan yang efektif dan efisien	27
SS.2. Terwujudnya layanan perbendaharaan yang efektif	31
SS.3. Terselenggaranya proses verifikasi yang transparan	33
SS.4. Terwujudnya Laporan Keuangan yang Berkualitas	35
3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2020 sampai 2023	37
3.3. Prestasi dan Inovasi	40

3.4. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2023	41
BAB IV - PENUTUP	45
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Tindak Lanjut	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Keuangan	11
Gambar 2. Jumlah Pegawai Biro Keuangan Berdasarkan Kualifikasi Jabatan	12
Gambar 3. Jumlah Pegawai Biro Keuangan berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	13
Gambar 4. Jumlah Pegawai Biro Keuangan berdasarkan Golongan	13
Gambar 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan	14
Gambar 6. Proporsi Pegawai Menurut Usia.....	14
Gambar 7. Proporsi Pegawai Menurut Unit Kerja.....	15
Gambar 8. Proporsi Pegawai Menurut Jenis Jabatan Fungsionalnya	16
Gambar 9. Proporsi Pegawai Menurut Jenjang Jabatan Fungsionalnya	17
Gambar 10. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Biro Keuangan 2020-2024	22
Gambar 11. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	23
Gambar 12. Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Keuangan Menurut Jenis Belanja Tahun 2023 (Juta Rupiah).....	42
Gambar 13. Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Keuangan untuk Gaji dan Tunjangan Tahun 2023 (Juta Rupiah).....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Biro Keuangan	24
Tabel 2. Penetapan Kinerja Biro Keuangan Tahun 2023.....	25
Tabel 3. Rata-Rata Capaian Kinerja Biro Keuangan Menurut Sasaran Strategis Tahun 2023	26
Tabel 4. Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Layanan Administrasi Keuangan yang Efektif dan Efisien Biro Keuangan Tahun 2023.....	31
Tabel 5. Tingkat Pencapaian Kinerja Terwujudnya Layanan Perbendaharaan yang Efektif dan Efisien Biro Keuangan Tahun 2023	33
Tabel 6. Tingkat Pencapaian Kinerja Terselenggaranya Proses Verifikasi yang Transparan pada Biro Keuangan Tahun 2023	35
Tabel 7. Tingkat Pencapaian Kinerja Terwujudnya Laporan Keuangan yang Berkualitas Biro Keuangan Tahun 2023	37
Tabel 8. Perbandingan Realisasi Kinerja Biro Keuangan Tahun 2023 dengan Tahun 2020 sampai 2022	38
Tabel 9. Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Keuangan Menurut Komponen Tahun 2023 (Rupiah).....	42
Tabel 10. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran Tahun 2023	44

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun 2023 adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Keuangan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah ringkasan LAKIP Biro Keuangan Tahun 2023.

- Sasaran Biro Keuangan Tahun 2023 merupakan penjabaran dari salah satu sasaran strategis Sekretariat Utama BPS yaitu “Meningkatnya Tata Kelola Penggunaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan” . Pencapaian sasaran program diukur berdasarkan beberapa indikator program yang salah satunya menjadi tanggung jawab Biro Keuangan BPS yaitu: Indikator persentase rekomendasi hasil reviu Inspektorat Utama terhadap Laporan Keuangan BPS yang ditindaklanjuti yang sumber datanya didapat dari Laporan Kegiatan Biro Keuangan.
- Tujuan dan sasaran kerja Biro Keuangan dijabarkan dalam indikator kinerja, meliputi:
 1. Presentase Produk Layanan Administrasi Keuangan yang terselesaikan.
 2. Persentase Pertanggungjawaban Keuangan yang diterbitkan tepat waktu
 3. Persentase Hasil Verifikasi Keuangan yang terbit sesuai standar aturan Kementerian Keuangan
 4. Laporan Keuangan yang tepat waktu
 5. Opini Laporan Keuangan BPS oleh BPK.
- Secara umum Biro Keuangan telah dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran dimaksud dengan nilai pencapaian kinerja rata-rata sangat baik dengan persentase rata-rata capaian penyelesaian kegiatan mencapai 101,34 persen.
- Pada aspek keuangan, pencapaian penyerapan anggaran Biro Keuangan sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 mencapai Rp248.425.066.186 atau 95,43 persen dari alokasi total pagu anggaran Unit Kerja Biro Keuangan sebesar Rp260.310.222.000
- Kendala yang dihadapi dalam proses pencapaian tujuan laporan keuangan yang berkualitas dengan opini WTP BPK RI atas Audit Laporan Keuangan, secara umum meliputi:

1. Adanya peraturan turunan terkait pelaksanaan anggaran seperti perka perjalanan dinas, pembayaran non tunai, paket meeting, dan kebijakan akuntansi.
2. Adanya perubahan aturan dan kebijakan bidang keuangan dari Kementerian Keuangan yang memerlukan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penerapannya di lingkungan Badan Pusat Statistik.
3. Proses perpindahan jabatan ke jabatan fungsional tertentu masih terhambat. Hingga akhir tahun 2023, lebih dari 50% pegawai di Biro Keuangan masih berada di jabatan fungsional umum. Hal ini terjadi karena beberapa sebab, antara lain ketidaksesuaian dokumen administrasi, belum lulus pada tahap uji kompetensi, syarat pendidikan dan golongan minimal yang belum memenuhi syarat, serta pegawai yang belum definitif sebagai fungsional tertentu.
4. Masih rendahnya jumlah pejabat PPK yang berasal dari fungsional keuangan.
5. Kekurangan dan keterlambatan kelengkapan dokumen yang disampaikan untuk pertanggungjawaban. Keterlambatan penyampaian dokumen tagihan oleh penanggung jawab kegiatan.

Walaupun Laporan Keuangan yang disusun oleh Biro Keuangan sejak tahun 2016 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), akan tetapi masih terdapat temuan-temuan yang harus dibenahi oleh Biro Keuangan. Jika hal ini dapat diselesaikan maka kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan akan semakin lebih baik.

Semoga pelaksanaan program dan kegiatan Biro Keuangan Tahun 2023 dapat memberikan kontribusi nyata di lingkungan Badan Pusat Statistik, terutama dalam upaya kualitas pengelolaan keuangan Badan Pusat Statistik yang lebih baik dan dapat mempertahankan opini WTP dari BPK RI atas Audit Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik.

BAB I - PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS), dalam mengemban tugasnya dalam menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, tentunya harus didukung dengan pengelolaan administrasi keuangan yang efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Biro Keuangan merupakan unit kerja eselon II BPS yang berada di bawah Sekretariat Utama yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi.

Fungsi Biro Keuangan BPS dijalankan melalui satu program generik yaitu Program Dukungan Manajemen (Dukman) dengan kegiatannya yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan. Adapun sasaran kegiatan yang dirumuskan yaitu (1) Terwujudnya layanan administrasi keuangan yang efektif dan efisien, (2) Terwujudnya layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien, (3) Terselenggaranya proses verifikasi yang transparan, dan (4) terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas.

Untuk mengukur keberhasilan Biro Keuangan dalam pencapaian kegiatan tahun 2023, maka pada awal tahun 2023 telah ditetapkan target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2023. Target tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja Biro Keuangan 2023.

Laporan Kinerja Biro Keuangan 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja unit kerja instansi pemerintah. Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Biro Keuangan BPS tahun 2020-2024, sehingga diharapkan laporan ini bisa dapat menjadi bahan acuan untuk mencapai kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya.

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Biro Keuangan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik dan diperbaharui dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:

Tugas

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan, perbendaharaan, verifikasi, dan akuntansi.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan Administrasi Keuangan;
- 2) Pelaksanaan Perbendaharaan;
- 3) Pelaksanaan Verifikasi; dan
- 4) Pelaksanaan Akuntansi.

Susunan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Biro Keuangan, berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik tanggal 17 Desember 2020, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Biro Keuangan secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Keuangan

Landasan Hukum

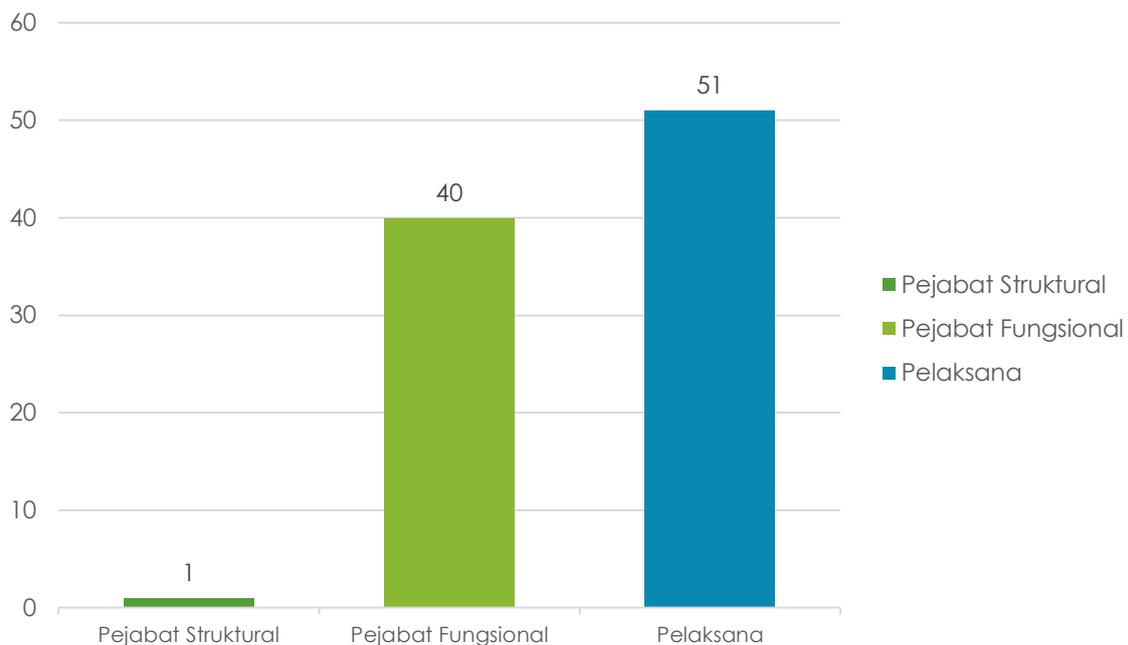
Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Keuangan dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu:

- 1) Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
- 4) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik dan telah diubah dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

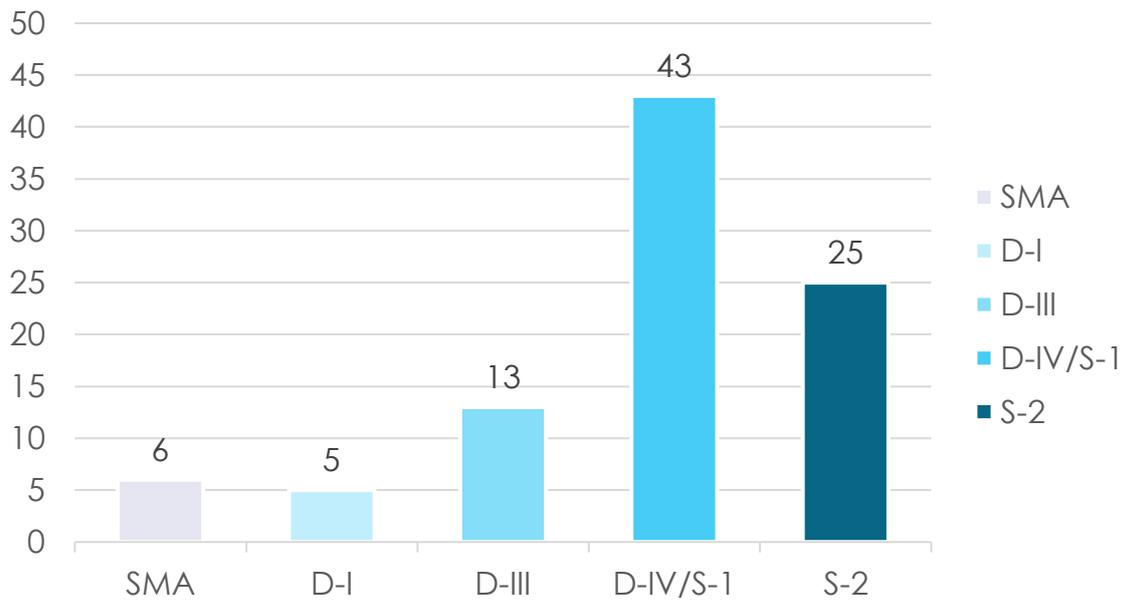
1.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan manajemen organisasi pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan *good governance*, diperlukan sumber daya aparatur yang profesional dan kompeten untuk menentukan keberhasilan organisasi pemerintah. Jumlah pegawai Biro Keuangan pada tahun 2023 adalah 92 (sembilan puluh dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Biro, 40 (empat puluh) pejabat fungsional, dan 51 (lima puluh satu) orang pelaksana.



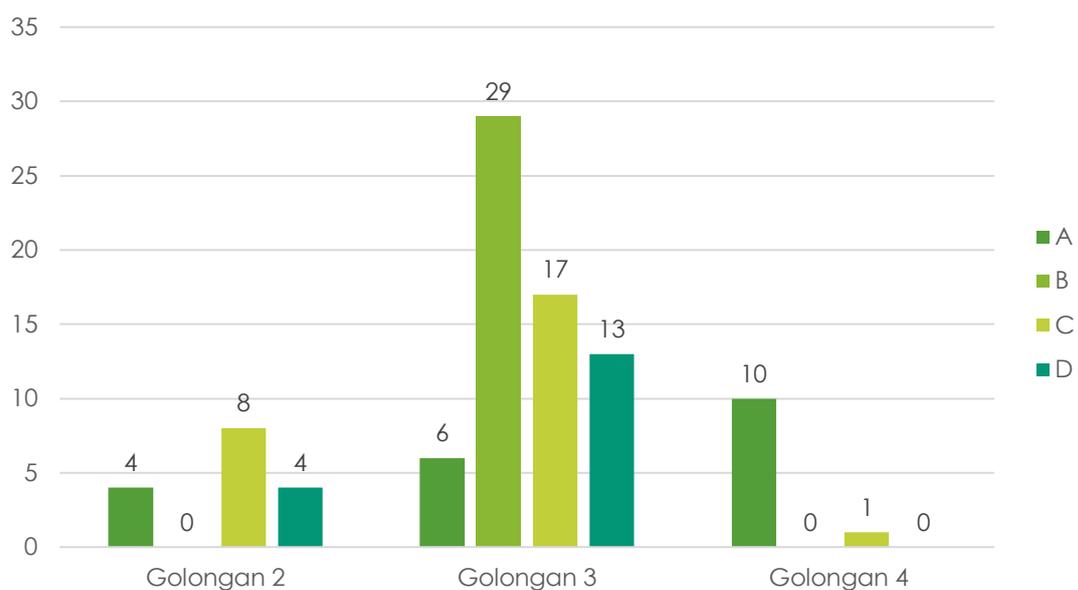
Gambar 2. Jumlah Pegawai Biro Keuangan Berdasarkan Kualifikasi Jabatan

Kualifikasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 3, dari 92 orang pegawai di Biro Keuangan tercatat sebanyak 25 pegawai (27,17 %) berpendidikan S-2, 43 pegawai (46,74 %) berpendidikan D-IV/S-1, 13 pegawai (14,13 %) berpendidikan D-III, 5 pegawai (5,43 %) berpendidikan D-I, dan 6 pegawai (6,52 %) berpendidikan SMA.



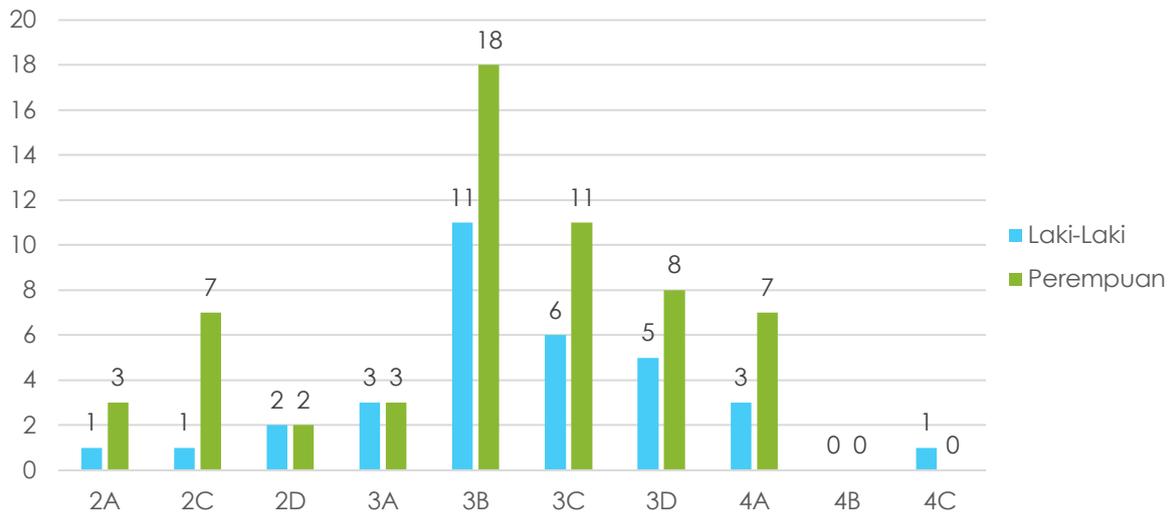
Gambar 3. Jumlah Pegawai Biro Keuangan berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Klasifikasi pegawai berdasarkan golongan didominasi oleh golongan III sebesar 65 orang (70,65 %) dari jumlah PNS sebesar 92 orang. Kemudian untuk golongan II terdapat 16 orang (17,39 %) dan untuk golongan IV terdapat 11 orang (11,96 %) dengan rincian seperti pada tabel berikut:



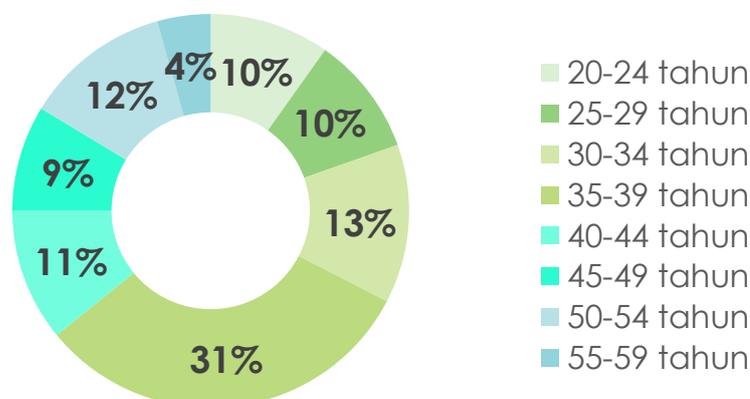
Gambar 4. Jumlah Pegawai Biro Keuangan berdasarkan Golongan

Klasifikasi pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari perempuan sebanyak 59 orang dan laki laki sebanyak 33 orang dari jumlah pegawai di Biro Keuangan sebesar 92 orang seperti terlihat pada gambar 5. Hampir di semua tingkatan golongan, pegawai perempuan lebih mendominasi daripada pegawai laki-laki.



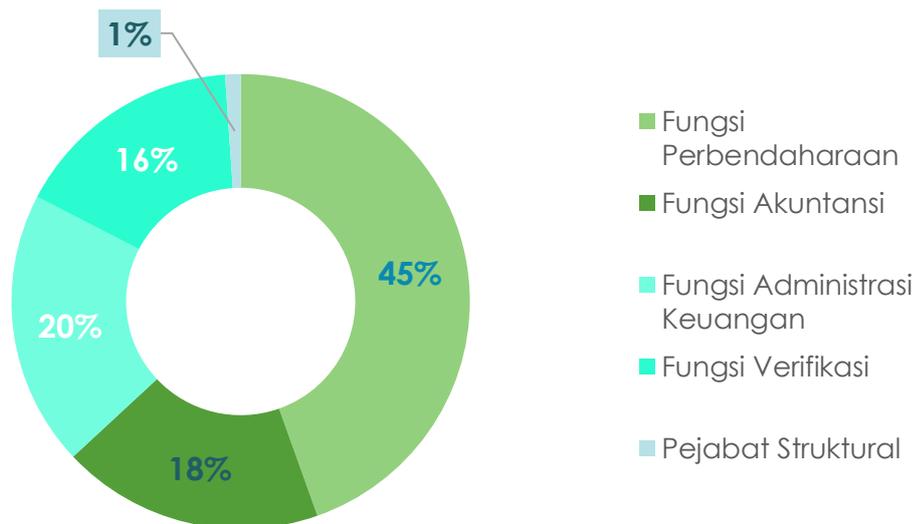
Gambar 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Proporsi pegawai berdasarkan usia didominasi oleh pegawai dengan usia 35-39 tahun seperti yang terlihat pada Gambar 6. Pada Biro Keuangan, terdapat 29 orang (31,52%) pegawai dengan usia 35-39 tahun, sisanya memiliki kategori umur dengan proporsi 9-11 persen kecuali kategori umur 55-59 tahun dan diatas 60 tahun yang memiliki proporsi sebesar 6,86 dan 0,98 persen.



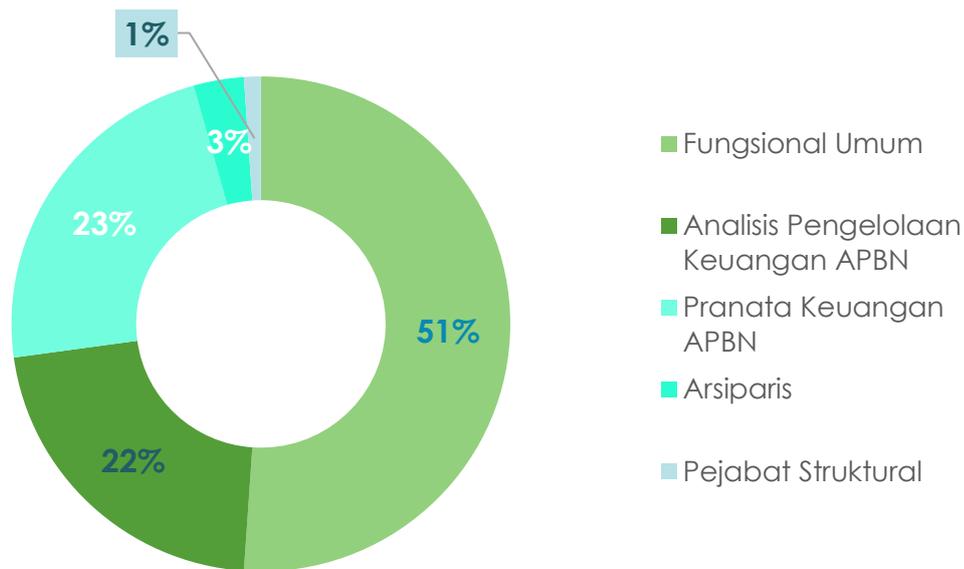
Gambar 6. Proporsi Pegawai Menurut Usia

Jumlah pegawai pada unit kerja Fungsi Administrasi Keuangan sebanyak 18 orang (19,57%), Bagian Akuntansi sebanyak 17 orang (18,48%), Bagian Verifikasi sebanyak 15 orang (16,30%). Sedangkan, jumlah pegawai pada unit kerja Fungsi Perbendaharaan sebanyak 41 orang (44,57%). Perbedaan jumlah pegawai antar unit kerja tersebut sudah disesuaikan dengan beban pekerjaan pada masing-masing unit kerja.



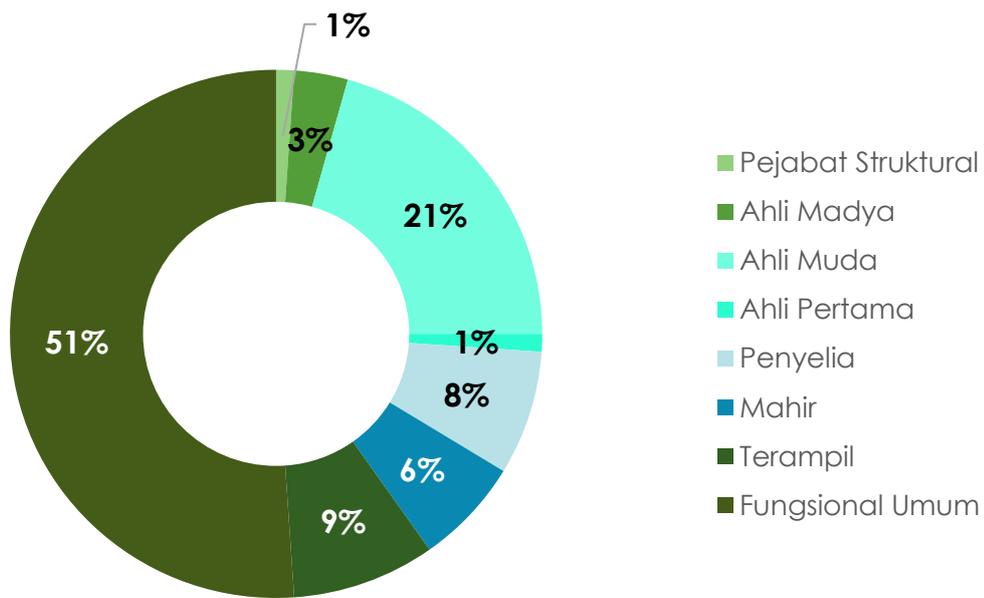
Gambar 7. Proporsi Pegawai Menurut Unit Kerja

Klasifikasi pegawai berdasarkan jenis jabatan fungsional masih didominasi oleh jabatan fungsional umum sebesar 47 orang (51,09%) dari jumlah PNS sebesar 92 orang. Sebanyak 45 orang (48,91%) lainnya, telah masuk kedalam jabatan fungsional tertentu, antara lain Analis Pengelola Keuangan ABPN sebanyak 20 orang (21,74%), Pranata Keuangan ABPN sebanyak 21 orang (22,83%), dan Arsiparis sebanyak 3 orang (3,26%). Selain itu, terdapat 1 orang (1,09%) pegawai yang merupakan pejabat struktural.



Gambar 8. Proporsi Pegawai Menurut Jenis Jabatan Fungsionalnya

Klasifikasi pegawai berdasarkan jenjang jabatan fungsional masih didominasi oleh jabatan fungsional umum sebesar 47 orang (51,09%) dari jumlah PNS sebesar 92 orang. Terdapat 3 orang (3,26%) berada pada jenjang Ahli Madya, 19 orang (20,65%) berada pada jenjang Ahli Muda, 1 orang (1,09%) berada pada jenjang Ahli Pertama, 7 orang (7,61%) berada pada jenjang Penyelia, 6 orang (6,52%) berada pada jenjang Mahir, dan 8 orang (8,70%) berada pada jenjang Terampil. Selain itu, terdapat 1 orang (1,09%) pegawai yang merupakan pejabat struktural.



Gambar 9. Proporsi Pegawai Menurut Jenjang Jabatan Fungsionalnya

1.3.2 Dukungan Anggaran

Biro Keuangan memiliki pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp260.310.222.000 dengan realisasi sebesar Rp248.425.066.186 atau 95,43 persen. Anggaran Biro Keuangan tahun 2023 terdiri dari belanja penempatan/mutasi pegawai, layanan manajemen keuangan, gaji dan tunjangan, serta operasional dan pemeliharaan kantor. Anggaran belanja penempatan/mutasi pegawai sebesar Rp5.320.213.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp4.774.304.233 atau 89,74 persen, anggaran belanja layanan manajemen keuangan sebesar Rp751.619.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp471.592.962 atau 62,74 persen, anggaran belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp252.312.373.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp242.187.230.991 atau 95,99 persen, serta anggaran belanja operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp1.926.017.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp991.938.000 atau 51,50 persen.

1.4. Potensi dan Permasalahan

Potensi dan Permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Biro Keuangan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1.4.1 Potensi

1. Biro Keuangan didukung oleh sumber daya manusia yang sudah memiliki sertifikat di bidang pengelolaan keuangan. Biro Keuangan didukung oleh 19 orang pegawai memiliki sertifikat PPK, 42 orang memiliki sertifikat Bendahara, 3 orang memiliki sertifikat PPSPM dan 24 orang memiliki sertifikat PBJ untuk mendukung pekerjaan.
2. Biro Keuangan memiliki potensi sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan merata. Sebanyak 25 pegawai (27,17 %) berpendidikan S-2, 43 pegawai (46,74 %) berpendidikan D-IV/S-1, 13 pegawai (14,13 %) berpendidikan D-III, 5 pegawai (5,43 %) berpendidikan D-I, dan 6 pegawai (6,52 %) berpendidikan SMA.
3. Biro Keuangan memiliki potensi sumber daya manusia dengan komposisi usia muda yang tinggi. Biro Keuangan didukung oleh banyaknya pegawai usia muda yang adaptif, inovatif dan kreatif dalam mendukung penyelesaian pekerjaan.
4. Kedudukan Biro Keuangan secara kelembagaan memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan.
5. Biro Keuangan telah memiliki, mengembangkan maupun menggunakan berbagai layanan penunjang kegiatan berbasis Teknologi Informasi seperti SIVERA (Sistem Verifikasi Anggaran), E-Calk, E-PIPK, SIMOKA, dan SEKAR.
6. Biro Keuangan telah membentuk 25 (dua puluh enam) tim kerja untuk mendistribusikan tugas pokok dan fungsi dalam rangka percepatan penyelesaian pekerjaan.

7. Komunikasi antara sesama pegawai maupun pegawai dengan Kepala Biro telah terjalin dengan baik melalui berbagai kegiatan seperti *Sharing Knowledge*, pekan olahraga, dan pemilihan *Employee of The Month* dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi.

1.4.2 Permasalahan

1. Belum adanya peraturan turunan terkait pelaksanaan anggaran seperti perka perjalanan dinas, pembayaran non tunai, paket meeting, dan kebijakan akuntansi.
2. Adanya perubahan aturan dan kebijakan bidang keuangan dari Kementerian Keuangan yang memerlukan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penerapannya di lingkungan Badan Pusat Statistik.
3. Proses perpindahan jabatan ke jabatan fungsional tertentu masih terhambat. Hingga akhir tahun 2023, lebih dari 50% pegawai di Biro Keuangan masih berada di jabatan fungsional umum. Hal ini terjadi karena beberapa sebab, antara lain ketidaksesuaian dokumen administrasi, belum lulus pada tahap uji kompetensi, syarat pendidikan dan golongan minimal yang belum memenuhi syarat, serta pegawai yang belum definitif sebagai fungsional tertentu.
4. Masih rendahnya jumlah pejabat PPK yang berasal dari fungsional keuangan.

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Biro Keuangan Tahun 2023 disusun berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan latar belakang; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi; sumber daya manusia dan dukungan anggaran; potensi dan permasalahan; sistematika penyajian.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis; rencana strategis (renstra); dan perjanjian kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi tentang analisis capaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja, penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja, solusi yang telah dilakukan serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan; potensi dan inovasi yang dilakukan; serta realisasi dan efisiensi anggaran tahun berjalan.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh unit kerja.

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Biro Keuangan

Dalam melakukan tugasnya selama lima tahun kedepan, Biro Keuangan telah menyusun Renstra Biro Keuangan tahun 2020-2024 yang tentunya mengacu pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024. Hal tersebut dilakukan agar tujuan dan sasaran Biro Keuangan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Utama. Renstra Biro Keuangan tahun 2020-2024 disusun sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan, sehingga diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Biro Keuangan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

Adapun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Biro Keuangan yang tertuang dalam Renstra Biro Keuangan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Visi

Biro Keuangan mempunyai visi yaitu "Pengelola Keuangan yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel" .

Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Biro Keuangan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan layanan administrasi keuangan yang efektif dan efisien.
- 2) Mewujudkan layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien.
- 3) Menyelenggarakan proses verifikasi yang transparan.
- 4) Mewujudkan Laporan Keuangan yang berkualitas.

Tujuan dan Sasaran Strategis

Biro Keuangan mempunyai empat tujuan yang dicanangkan dalam Renstra Biro Keuangan tahun 2020-2024. Tujuan Biro Keuangan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran yang merupakan tahapan untuk memudahkan mengukur dan mencapai tujuan tersebut. Masing-masing tujuan dan sasaran strategis tersebut memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
Menyelenggarakan Layanan Administrasi Keuangan	SS.1. Terwujudnya layanan administrasi keuangan yang efektif dan efisien	IKSS 1.1. Presentase Produk Layanan Administrasi Keuangan yang terselesaikan
Mempertanggungjawabkan keuangan secara akuntabel, efektif dan efisien	SS.2. Terwujudnya layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien	IKSS 2.1. Persentase pertanggungjawaban keuangan yang diterbitkan tepat waktu
Menyelenggarakan proses verifikasi keuangan	SS.3. Terselenggaranya proses verifikasi yang Transparan	IKSS 3.1. Persentase Hasil Verifikasi Keuangan yang terbit sesuai standar aturan kementerian keuangan
Menyusun dan menerbitkan Laporan keuangan	SS.4. Terwujud laporan keuangan yang berkualitas	IKSS 4.1. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu IKSS 4.2. Opini laporan keuangan BPS oleh BPK

Gambar 10. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Biro Keuangan 2020-2024

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Biro Keuangan dapat terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 11. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

2.2 Rencana Strategis (Renstra)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana organisasi telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKU Biro Keuangan telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 yang kemudian diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 . IKU Biro Keuangan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rencana Strategis Biro Keuangan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Renstra				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)			
1.	Terwujudnya Layanan Administrasi keuangan yang efektif dan efisien	Persentase TGR yang ditindaklanjuti	100,00	-	-	-	-
		Jumlah aplikasi yang didukung penerapan smart office yang digunakan untuk pelayanan	100,00	-	-	-	-
		Persentase Produk Layanan Administrasi Keuangan yang terselesaikan	-	85,00	95,00	95,00	95,00
2.	Terwujudnya layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien	Jumlah laporan keuangan Satker Sestama yang tepat waktu	5	-	-	-	-
		Persentase pertanggungjawaban keuangan yang diterbitkan tepat waktu	-	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Terselenggaranya proses verifikasi yang transparan	Persentase SPM yang terbit sesuai standar ketentuan	95,00	-	-	-	-
		Persentase SPM yang terbit sesuai standar aturan kementerian keuangan	-	96,00	96,00	96,00	96,00
4.	Terwujudnya Laporan Keuangan yang Berkualitas	Laporan Keuangan yang tepat waktu	-	517	517	517	517
		Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	WTP (100%)	WTP (100%)	WTP (100%)	WTP (100%)	WTP (100%)

Jika membandingkan indikator dan target pada tahun 2022, Biro Keuangan telah melakukan reuiu renstra yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan satu indikator pada tahun 2022 pada sasaran strategis "Terwujudnya Laporan Keuangan yang Berkualitas" yaitu Laporan Keuangan

yang tepat waktu diubah menjadi Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu. Indikator pada tahun 2020 dan 2021 menggunakan satuan jumlah, sementara indikator mulai tahun 2022 menggunakan satuan persentase.

2. Keseluruhan 5 (lima) indikator, yaitu presentase produk layanan administrasi keuangan yang terselesaikan, persentase pertanggungjawaban keuangan yang diterbitkan tepat waktu, persentase SPM yang terbit sesuai standar aturan kementerian keuangan, jumlah laporan keuangan yang tepat waktu, dan opini laporan keuangan BPS oleh BPK telah mencapai target kerjanya.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pada awal tahun 2023, Biro Keuangan telah menetapkan target yang harus dicapai dan menjadi ukuran keberhasilan Biro Keuangan dalam memenuhi tugasnya di tahun 2023. Target tersebut dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Keuangan yang merupakan bentuk komitmen Biro Keuangan kepada Sekretaris Utama BPS. Berikut tabel penetapan kinerja Biro Keuangan tahun 2023 untuk masing-masing indikator sasaran.

Tabel 2. Penetapan Kinerja Biro Keuangan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Perubahan	Satuan	Target Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya layanan administrasi keuangan yang efektif dan efisien	Persentase Produk Layanan Administrasi Keuangan yang terselesaikan	Persen	95
2.	Terwujudnya layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien	Persentase pertanggungjawaban keuangan yang diterbitkan tepat waktu	Persen	100
3.	Terselenggaranya proses verifikasi yang transparan	Persentase Hasil Verifikasi Keuangan yang terbit sesuai standar aturan kementerian keuangan	Persen	96
4.	Terwujud laporan keuangan yang berkualitas	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	Persen	100
		Opini laporan keuangan BPS oleh BPK	Skor	WTP (100)

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Akuntabilitas kinerja Biro Keuangan merupakan perwujudan kewajiban Biro Keuangan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Biro Keuangan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Biro Keuangan 2023 dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja selama tahun 2023 dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023.

Pada tahun 2023, rata-rata capaian kinerja Biro Keuangan terhadap target yang telah ditetapkan mencapai 101,34 persen.

Tabel 3. Rata-Rata Capaian Kinerja Biro Keuangan Menurut Sasaran Strategis Tahun 2023

Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)
1. Terwujudnya layanan administrasi keuangan yang efektif dan efisien	1	103.78
2. Terwujudnya layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien	1	100,00
3. Terselenggaranya proses verifikasi yang transparan	1	102.94
4. Terwujud laporan keuangan yang berkualitas	2	100,00
Rata-Rata Capaian Kinerja		101,34

SS.1. Terwujudnya Layanan Administrasi keuangan yang efektif dan efisien

Sasaran pertama ini merupakan tugas pokok Biro Keuangan dalam mewujudkan layanan administrasi keuangan yang efektif dan efisien. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan pelayanan terkait proses administrasi bidang keuangan secara efektif dan efisien dalam mendukung kelancaran kegiatan teknis bidang statistik. Dalam pelaksanaannya, Biro Keuangan menyediakan suatu sistem yang saling terhubung dan terintegrasi pada masing-masing bagian sehingga menghasilkan layanan administrasi keuangan yang cepat, tepat, akurat, transparan, dan akuntabel.

Dalam memberikan layanan administrasi keuangan yang efektif dan efisien, Biro Keuangan tetap mengedepankan *good governance* dalam pengelolaannya. *Good governance* dicapai dengan cara menata kelembagaan pada Biro Keuangan sehingga dalam pelaksanaannya tidak tumpang tindih serta menjaga setiap fungsi berjalan secara maksimal, memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki terutama sumber daya manusia dengan senantiasa meningkatkan kemampuan dan kapabilitas pegawai, serta mengikuti secara aktif perkembangan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan Tabel 4, capaian kinerja tujuan Menyelenggarakan Layanan Administrasi Keuangan dan sasaran strategis Terwujudnya Layanan Administrasi Keuangan yang Efektif dan Efisien mengalami kenaikan di tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 0,25 poin.

Rata-rata tingkat capaian sasaran "Terwujudnya Layanan Administrasi Keuangan yang efektif dan efisien" adalah sebesar 103,78 persen. Sasaran ini dinilai berdasarkan satu indikator kinerja, yaitu Presentase Produk Layanan Administrasi Keuangan yang terselesaikan. Indikator tersebut dihitung dengan pembagian dari 6 (enam) layanan utama

yang dilakukan oleh Biro Keuangan, yaitu persentase pemrosesan administrasi biaya pindah yang terselesaikan, persentase pemrosesan administrasi penghasilan pegawai yang terselesaikan, persentase pemrosesan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang terselesaikan, persentase pemegang KKP yang terproses, persentase penyusunan Pedoman Administrasi Keuangan (PAK), dan persentase pemrosesan pemberkasan arsip dan penataan arsip keuangan yang terselesaikan.

Presentasi Biaya Pindah yang terselesaikan mendapatkan capaian kinerja sasaran 88,66 persen, dari usulan yang masuk sebanyak 535 pegawai proses administrasi pembayaran biaya pindah bekerja sudah selesai sejumlah 515 pegawai, yang pindah menetap karena pensiun sebanyak 16 pegawai, dan untuk biaya pemulangan jenazah (mengantar/menjemput jenazah) sebanyak 8 pegawai. Dari sejumlah usulan yang masuk tersebut di atas terdapat 1 pegawai yang biaya pindah bekerja dan 1 pegawai pensiun belum selesai prosesnya, serta 2 pegawai yang usulan biaya pindah pensiunnya dibatalkan. Pembatalan tersebut dilakukan karena persyaratan dari administrasi biaya pindahnya tidak sesuai aturan yang berlaku. Kendala yang dihadapi atas pembayaran biaya pindah tersebut karena sulitnya untuk memperoleh data jarak dari instansi terkait, dan adanya perubahan persyaratan dari pembayaran biaya pindah pensiun, kelengkapan dokumen tidak lengkap sehingga proses pembayaran lebih lama. Terhadap kendala yang terjadi dilakukan sosialisai baik melalui WAG, melalui supervisi ke daerah ataupun kegiatan Rakor.

Persentase pemrosesan administrasi penghasilan pegawai (ASN dan PPNPN) mendapatkan capaian kinerja sasaran 105,26 persen, termasuk di dalamnya Daftar Gaji Induk (12 bulan, Tunjangan Hari Raya dan Gaji Bulan ke-13), Daftar Kekurangan Gaji /rapel, kekurangan Tunjangan Struktural dan Tunjangan Fungsional, gaji susulan, gaji terusan, Daftar Tunjangan Kinerja dan Daftar Uang Makan, Daftar Realisasi Belanja Pegawai (12 bulan), Daftar Monitoring Pembayaran Hutang Pegawai melalui Pematangan Gaji (12

bulan), Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji untuk pegawai pindah/pensiun/meninggal dunia (12 bulan), Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja (12 bulan), dan Daftar Pembayaran uang makan (12 bulan).

Kendala yang dihadapi pada tahun 2023, antara lain:

1. Keterlambatan penyampaian SK perubahan gaji pegawai dari Biro SDM
2. Migrasi aplikasi GPP ke Aplikasi Gaji Web.

Terhadap kendala tersebut dilakukan koordinasi dengan Biro SDM dan DJPb.

Persentase pemrosesan tuntutan ganti rugi (TGR) yang terselesaikan mendapatkan capaian kinerja sasaran 107,28 persen dari total 28 kasus yang ditindaklanjuti. Untuk TGR jenis kasus wanprestasi Ikatan Dinas/Tugas Belajar terdapat 4 (empat) kasus baru di tahun 2023. Untuk TGR jenis kasus kehilangan kendaraan roda dua terdapat 19 (sembilan belas) kasus baru di tahun 2023 dan untuk TGR jenis kasus kehilangan barang inventaris kantor terdapat 5 (lima) kasus baru di tahun 2023. Walaupun capaian tinggi dalam pencapaian bukan tanpa kendala dalam penyelesaiannya, sebagai berikut:

1. Dokumen informasi terjadinya kerugian negara dari satuan kerja tidak lengkap atau tidak sesuai;
2. Debitur tidak responsif atau cenderung menghindar ketika dihubungi;
3. Debitur keberatan dengan nilai TGR yang ditetapkan oleh tim TPKN;
4. Validitas dokumen yang menjadi dasar perhitungan TGR kasus wanprestasi Ikatan Dinas dari unit-unit kerja terkait.

Solusi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut dilakukan;

1. Koordinasi dengan satuan kerja untuk melengkapi atau mengirimkan koreksi dokumen informasi tuntutan ganti rugi
2. Berkomunikasi dengan keluarga, kerabat, dan atau mendatangi ke kediaman ybs. supaya kooperatif dalam melunasi kerugian negara

3. Melakukan tindak lanjut keberatan nilai TGR yang selanjutnya diputuskan oleh tim TPKN apakah keberatan diterima atau tidak

Persentase KKP yang terproses untuk diterbitkan KKP mendapatkan capaian kinerja sasaran 100 persen dari jumlah KKP yang telah diusulkan. Keadaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terdapat 32 (tiga puluh dua) yang masih aktif dan sementara dilakukan blokir sementara yang akan dibuka blokir lagi pada tahun 2024.

Prosentase penyusunan Pedoman Administrasi Keuangan (PAK) yang terselesaikan mendapat capaian kinerja 100 persen dari 1 PAK yang telah diusulkan dan ditindaklanjuti pada tahun 2023 digunakan untuk seluruh kegiatan sensus dan survei yang dilakukan oleh BPS. Kendala yang ditemui pada saat penyusunan buku pedoman ini adalah perubahan kebijakan yang tidak tertulis sebagai salah satu sumber pedoman administrasi keuangan.

Persentase pemrosesan pemberkasan arsip dan penataan arsip keuangan yang terselesaikan mendapatkan capaian kinerja sasaran 100 persen, dari pemberkasan arsip dokumen yang masuk sebanyak 4284 dan penerbitan SP2D (arsip dari Biro keuangan dan ULP) sebanyak 4284. Untuk kegiatan Penataan arsip keuangan daerah tidak ada target pelaksanaan kegiatan di tahun ini. Kendala dari pelaksanaan penataan arsip keuangan pusat adalah kegiatan yang menumpuk di akhir tahun menyebabkan penataan arsip menumpuk di akhir tahun. Pelaksanaan penataan arsip daerah kendalanya adalah kurangnya sumber daya manusia dan ketidaktersediaan ruang penyimpanan.

Tabel 4. Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Layanan Administrasi Keuangan yang Efektif dan Efisien Biro Keuangan Tahun 2023

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
T.1.Menyelenggarakan Layanan Administrasi Keuangan							
SS.1.Terwujudnya Layanan Administrasi Keuangan yang Efektif dan Efisien							
Presentase Produk Layanan Administrasi Keuangan yang terselesaikan	Persen	95	98,35	103,53	95	98,59	103,78

SS.2. Terwujudnya layanan perbendaharaan yang efektif

Berdasarkan Tabel 5, capaian kinerja tujuan Mempertanggungjawabkan keuangan secara akuntabel, efektif dan efisien dan sasaran strategis Berdasarkan Terwujudnya Layanan Perbendaharaan yang Efektif dan Efisien pada tahun 2023 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2022.

Sasaran terwujudnya layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien pada tahun 2023 rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100 persen dari perhitungan 1 indikator persentase pertanggungjawaban keuangan yang diterbitkan tepat waktu. Indikator tersebut dihitung dengan pembagian dari 3 (tiga) layanan utama yang dilakukan oleh Biro Keuangan dalam hal perbendaharaan, yaitu persentase dokumen pertanggungjawaban keuangan yang telah diproses menjadi SPP, persentase laporan keuangan yang diterbitkan dari target, dan persentase penerimaan negara yang telah disetorkan ke kas negara dari seluruh penerimaan negara yang masuk ke rekening bendahara.

Persentase pemrosesan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang terselesaikan mendapatkan capaian 100 persen dari total 4.289 dokumen yang masuk. Total semua SPP yang telah diproses tersebut merupakan total akumulasi dari 11 (sebelas) kegiatan yang ada di tahun 2023. Target laporan yang dibuat oleh masing-masing BPP setiap bulannya juga tercapai 100 persen, dimana setiap BPP setiap bulan membuat dan melaporkan LPJ BPP.

Sasaran kedua ini adalah perwujudan dari tujuan pertanggungjawaban keuangan yang diterbitkan tepat waktu. Dalam mewujudkan tujuan ini, maka setiap proses realisasi belanja dan pendapatan dilaksanakan secara cepat, teliti, transparan, dan didukung oleh dokumen sumber terkait yang andal. Setiap tahapan proses pelaksanaan layanan dilakukan secara hati-hati tanpa mengabaikan kecepatan dan ketepatan proses serta didukung otorisasi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan adalah jadwal kegiatan yang sering tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan, sehingga tagihan menumpuk di akhir tahun, dan dokumen pertanggungjawaban yang tidak lengkap. Koordinasi dengan subject matter lain terkait untuk menindaklanjuti kekurangan dokumen tersebut.

Untuk meningkatkan layanan ini, Biro Keuangan telah menerapkan sistem kerja berbasis *smart office*, yaitu salah satu tahapan dalam pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) telah menggunakan aplikasi *Back Office Selindo (BOS)*, penggunaan aplikasi *Back Office Selindo (BOS)* juga dapat mempermudah dalam hal monitoring penggunaan dan realisasi anggaran. Serta terdapat aplikasi Sivera yang dapat digunakan dalam pemantauan pertanggungjawaban keuangan untuk memudahkan penelusuran jejak dokumen pertanggungjawaban keuangan dan penyusunan laporan keuangan tingkat satuan kerja yaitu Satuan Kerja Sekretariat Utama, terkoordinasinya pendokumentasian

pertanggungjawaban keuangan dengan Tim Administrasi Keuangan sehingga memudahkan untuk pencarian dokumen pertanggungjawaban keuangan saat pemeriksaan intern dan ekstern. Serta penerimaan dokumen pertanggungjawaban keuangan dari *subject matter* melalui satu pintu loket yang telah disediakan berikut dengan petugasnya dengan memperhatikan kelengkapan dokumen.

Tabel 5. Tingkat Pencapaian Kinerja Terwujudnya Layanan Perbendaharaan yang Efektif dan Efisien Biro Keuangan Tahun 2023

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
T.2 Mempertanggungjawabkan keuangan secara akuntabel, efektif dan efisien							
SS.2. Terwujudnya Layanan Perbendaharaan yang Efektif dan Efisien							
Persentase pertanggungjawaban keuangan yang diterbitkan tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

SS.3. Terselenggaranya proses verifikasi yang transparan

Sasaran ketiga adalah terselenggaranya proses verifikasi keuangan yang transparan. Sasaran ini diwujudkan dengan proses pemeriksaan setiap dokumen keuangan yang dihasilkan dari proses pelaksanaan anggaran dilakukan secara sistematis dan transparan. Proses verifikasi keuangan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan baik dalam jumlah, peruntukannya, dan dokumen-dokumen pendukungnya.

Berdasarkan Tabel 6. capaian kinerja tujuan Menyelenggarakan Proses Verifikasi Keuangan dan sasaran strategis Terselenggaranya Proses Verifikasi yang Transparan mengalami kenaikan di tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 0,46 poin.

Pada tahun 2023, sasaran terselenggaranya proses verifikasi yang transparan mendapatkan realisasi sebesar 98,82 persen. Jumlah SPP yang terbit sebanyak 4.340. SPP tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian sehingga layak diterbitkan SPM. Jumlah SPM yang terbit selama 2023 sebanyak 4.289 SPM, selisihnya adalah jumlah SPP yang batal. Berdasarkan renstra tahun 2020-2024, pada tahun 2023 target indikator Persentase Hasil Verifikasi Keuangan yang terbit sesuai standar aturan kementerian keuangan adalah 96 persen, sehingga capaian kinerja Sasaran Strategis Terselenggaranya Proses Verifikasi yang Transparan pada Biro Keuangan Tahun 2023 adalah 102,94 persen. Ditemukan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi Perbendaharaan sebagai berikut:

1. Sering ditemui berkas yang tidak lengkap sebagai syarat diterbitkan SPM.
2. Sering ditemui kesalahan berulang dalam pembuatan SPP, seperti diantaranya salah pembebanan, salah uraian spp, salah rekening penerima, salah penjumlahan yang mengakibatkan lebih/kurang bayar.
3. Revisi POK yang terlalu sering.
4. Monitoring masih manual dalam bentuk excel, rawan salah rumus.
5. Jaringan internet yang kurang cepat terkadang menjadi kendala ketika mengirim (mengunggah) SPM.

Untuk mengatasi masalah diatas fungsi verifikasi menerbitkan kertas kerja permasalahan dan berkoordinasi dengan PPK.

Tabel 6. Tingkat Pencapaian Kinerja Terselenggaranya Proses Verifikasi yang Transparan pada Biro Keuangan Tahun 2023

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
T.3 Menyelenggarakan Proses Verifikasi Keuangan							
SS.3.Terselenggaranya Proses Verifikasi yang Transparan							
Presentase Hasil Verifikasi Keuangan yang terbit Persentase sesuai standar aturan kementerian keuangan	Persen	96	98,38	102,48	96	98,82	102,94

SS.4. Terwujudnya Laporan Keuangan yang Berkualitas

Sasaran keempat adalah terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa setiap Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas salah satunya adalah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN pada BPS.

Berdasarkan Tabel 7, capaian kinerja tujuan Menyusun dan Menerbitkan Laporan Keuangan dan sasaran strategis Terwujudnya Laporan Keuangan yang Berkualitas pada tahun 2023 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2022.

Biro Keuangan sebagai unit yang mengelola keuangan BPS melaksanakan proses akuntansi dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan

disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Pada setiap akhir periode pelaporan keuangan, laporan keuangan yang disusun dan diterbitkan oleh Biro Keuangan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil dari pemeriksaan laporan keuangan tersebut berupa opini. Opini yang ditargetkan untuk dicapai pada setiap akhir pelaksanaan APBN adalah Wajar Tanpa Pengecualian. Lalu, jumlah laporan keuangan yang harus terbit tepat waktu pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 517 laporan keuangan.

Pada tahun 2023, sasaran terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas mendapatkan capaian sesuai target, yaitu sebesar 100 persen. Capaian ini dicapai karena kedua capaian nilai indikator dari sasaran ini mendapat nilai 100 persen. Jumlah laporan keuangan tingkat satker dan wilayah yang terbit tepat waktu selama tahun 2023 berjumlah 517 sesuai dengan jumlah satker yang ada pada BPS. LK dikirim secara berjenjang pada internal BPS dan dikirim ke pihak eksternal yaitu Kemenkeu sesuai dengan jadwal pada surat penyusunan LKKL K/L yang diterbitkan oleh Kemenkeu. Dalam penyusunan Laporan Keuangan ditemukan kendala yaitu masih ditemukan kesalahan dalam pencatatan dan kurang mempersiapkan dokumen sumber, akibat dari proses penyesuaian dengan sistem aplikasi baru yakni SAKTI dan MonSAKTI. Solusi dari kendala tersebut adalah melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pihak internal dan eksternal mengenai koreksi pencatatan dan dokumen sumber.

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL K/L) BPS pada tahun 2023 adalah LKKL K/L BPS TA 2022. LKKL K/L ini telah diperiksa oleh BPK dan mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Pencapaian opini WTP tidak mulus saja diperoleh terdapat kendala dalam pencapaiannya ketidaksesuaian pencatatan pada satker sehingga koreksi pencatatan harus dilakukan. Solusi yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan guna mengusulkan jurnal koreksi audit.

Tabel 7. Tingkat Pencapaian Kinerja Terwujudnya Laporan Keuangan yang Berkualitas Biro Keuangan Tahun 2023

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
T.4 Menyusun dan Menerbitkan Laporan Keuangan							
SS.4.Terwujudnya Laporan Keuangan yang Berkualitas							
Laporan Keuangan yang tepat waktu	Persen	517	517	100.00	517	517	100,00
Opini laporan keuangan BPS oleh BPK		WTP (100%)	WTP (100%)	100,00	WTP (100%)	WTP (100%)	100,00

3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2020 sampai 2023

Rencana Strategis adalah proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Rencana Strategis merupakan proses perencanaan jangka menengah (lima tahun) yang formal untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mengetahui keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya pengukuran terhadap indikator-indikator yang mewakili pencapaian kedua hal tersebut.

Tabel 8. Perbandingan Realisasi Kinerja Biro Keuangan Tahun 2023 dengan Tahun 2020 sampai 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Renstra				Realisasi				Capaian Thd Target (%)			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)			(5)	(6)			(7)	(8)		
1.	Terwujudnya Layanan Administrasi keuangan yang efektif dan efisien	Persentase TGR yang ditindaklanjuti	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-
		Jumlah aplikasi yang didukung penerapan smart office yang digunakan untuk pelayanan	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-
		Persentase Produk Layanan Administrasi Keuangan yang terselesaikan	-	85,00	95,00	95,00	-	98,15	98,35	98,58	-	114,21	103,53	103,78
2.	Terwujudnya layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien	Jumlah laporan keuangan Satker Sestama yang tepat waktu	5	-	-	-	5	-	-	-	100,00	-	-	-
		Persentase pertanggungjawaban keuangan yang diterbitkan tepat waktu	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100	100	-	100,00	100,00	100,00

3.	Terselenggaranya proses verifikasi yang transparan	Persentase SPM yang terbit sesuai standar ketentuan	95,00	-	-	-	74,08	-	-	-	77,98	-	-	-
		Persentase SPM yang terbit sesuai standar aturan kementerian keuangan	-	96,00	96,00	96,00	-	99,04	98,38	98,82	-	103,17	102,48	102,94
4.	Terwujudnya Laporan Keuangan yang Berkualitas	Laporan Keuangan yang tepat waktu	-	517	517	517	-	517	517	517	-	100,00	100,00	100,00
		Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	WTP (100%)	100,00	100,00	100,00	100,00							

3.3. Prestasi dan Inovasi

3.3.1 Prestasi

1. Opini LK WTP

Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2022.

2. Peringkat Kelima Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2022

Badan Pusat Statistik melalui biro keuangan memperoleh peringkat kelima untuk penilaian kinerja anggaran kategori pagu sedang.

3. Penghargaan Biro Keuangan sebagai Unit Pengolah dengan Hasil Audit Kearsipan Internal Tahun 2023 Terbaik II

Atas pencapaiannya dalam Pengelolaan Arsip di Lingkup Unit Kerjanya dengan Nilai Audit Kearsipan Internal Tahun 2023 sebesar 97.75 dengan Kategori AA Sangat Memuaskan

3.3.2 Inovasi

1. Aplikasi E-PIPK

E-PIPK adalah aplikasi yang digunakan untuk memfasilitasi penerapan dan penilaian PIPK di lingkup Badan Pusat Statistik. Penerapan PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai.

2. SIMOKA

Sistem Monitoring Administrasi Keuangan Pusat (SIMOKA) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh tim tata usaha biro keuangan. Aplikasi ini digunakan untuk memonitoring dan memudahkan proses yang terkait pembayaran gaji pegawai.

3. Sharing Knowledge

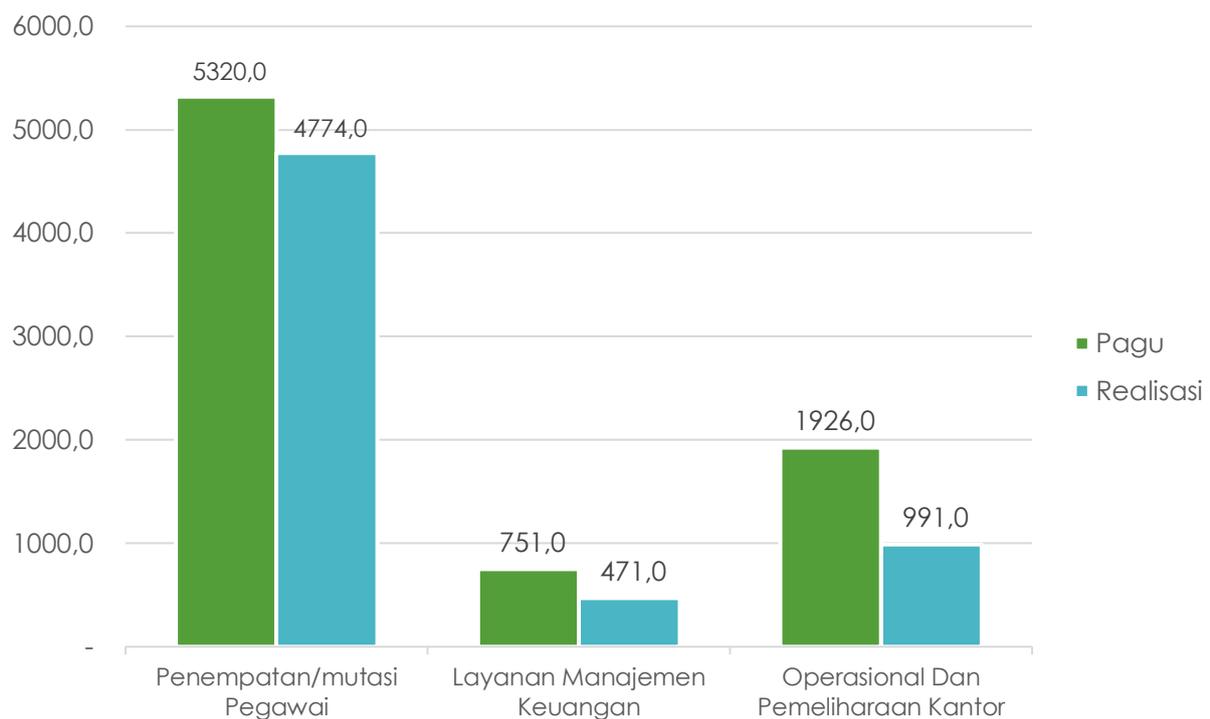
Sharing Knowledge adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh tim reformasi birokrasi biro keuangan sebagai media komunikasi antar pegawai sekaligus untuk memberikan informasi atau hal yang baru terkait pengembangan pegawai.

3.4. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2023

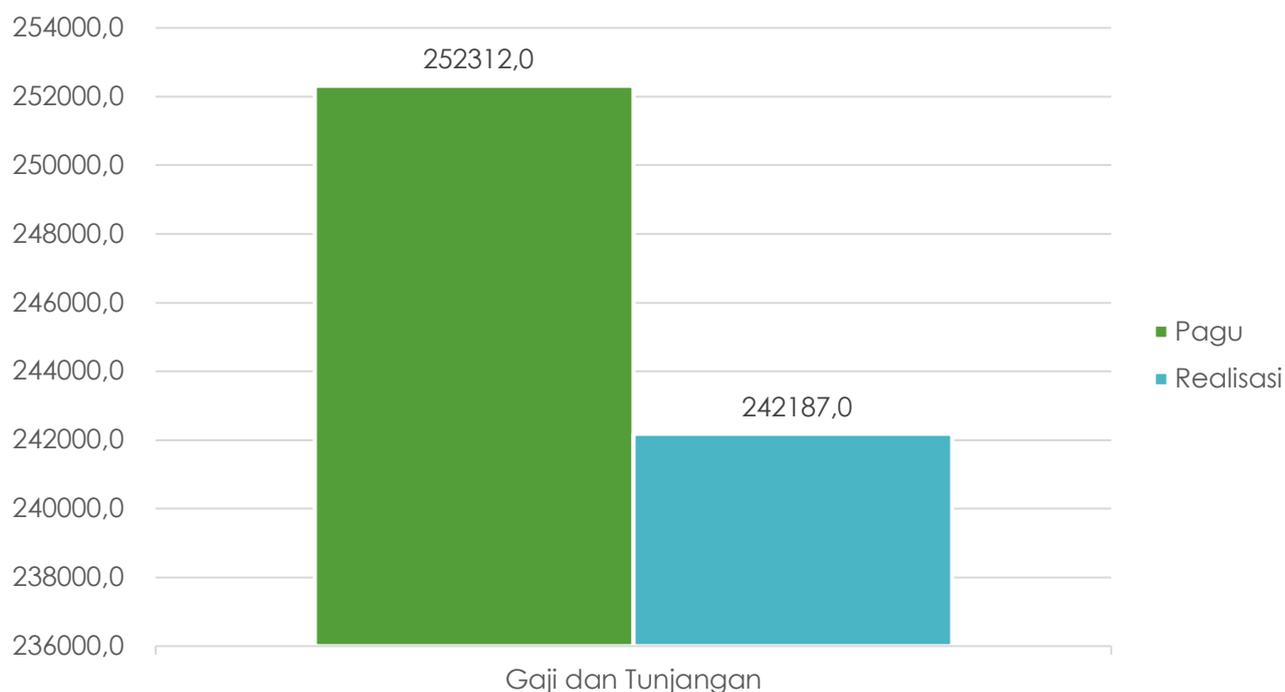
Pada tahun anggaran 2023, Biro Keuangan menerima pagu anggaran sebesar Rp260.310.222.000 dengan realisasi sebesar Rp248.425.066.186 atau 95,43 persen. Anggaran Biro Keuangan tahun 2023 terdiri dari belanja penempatan/mutasi pegawai, layanan manajemen keuangan, gaji dan tunjangan, serta operasional dan pemeliharaan kantor. Anggaran belanja penempatan/mutasi pegawai sebesar Rp5.320.213.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp4.774.304.233 atau 89,74 persen, anggaran belanja layanan manajemen keuangan sebesar Rp751.619.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp471.592.962 atau 62,74 persen, anggaran belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp252.312.373.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp242.187.230.991 atau 95,99 persen, serta anggaran belanja operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp1.926.017.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp991.938.000 atau 51,50 persen.

Tabel 9. Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Keuangan Menurut Komponen Tahun 2023 (Rupiah)

Komponen	Pagu	Realisasi	Realisasi/Pagu (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Penempatan/mutasi Pegawai	5.320.213.000	4.774.304.233	89,74
Layanan Manajemen Keuangan	751.619.000	471.592.962	62,74
Gaji dan Tunjangan	252.312.373.000	242.187.230.991	95,99
Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.926.017.000	991.938.000	51,50
Jumlah	260.310.222.000	248.425.066.186	95,43



Gambar 12. Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Keuangan Menurut Jenis Belanja Tahun 2023 (Juta Rupiah)



Gambar 13. Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Keuangan untuk Gaji dan Tunjangan Tahun 2023 (Juta Rupiah)

Sejak berlakunya sistem penganggaran berbasis kinerja mendorong Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan efisiensi penganggaran. Artinya setiap rupiah yang dikeluarkan harus diimbangi dengan kinerja yang dihasilkan. Perbandingan persentase antara capaian kinerja dengan realisasi penyerapan anggaran Biro Keuangan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah, terlihat bahwa Biro Keuangan mampu melakukan efisiensi pada seluruh sasaran strategis.

Tabel 10. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran Tahun 2023

Tujuan/Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Pagu TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
(1)		(2)	(3)	(4)	
SS.1.Terwujudnya layanan administrasi keuangan yang efektif dan efisien	103,78	257.984.182.000	247.207.055.747	95,82	7,96
SS.2.Terwujudnya layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien	100,00	2.016.049.000	1.041.118.544	51,64	48,36
SS.3.Terselenggaranya proses verifikasi yang Transparan	102,94	6.750.000	4.950.000	73,33	29,61
SS.4.Terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas	100,00	303.241.000	171.941.895	56,70	43,30
Jumlah	101,34	260.310.222.000	248.425.066.186	95,43	

Upaya-upaya efisiensi yang dilakukan Biro Keuangan diantaranya adalah penghematan anggaran perjalanan dinas dan paket meeting dengan pelaksanaan kegiatan secara terintegrasi dengan Biro Perencanaan selama tahun 2023, optimalisasi penggunaan kendaraan dinas, dan penghematan kertas dan toner untuk pencetakan laporan keuangan yang saat ini dilakukan pengiriman melalui e-mail.

BAB IV - PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Keuangan BPS tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik yaitu dengan rata-rata capaian sebesar 101,34 persen. Upaya-upaya untuk dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja perlu terus dilakukan oleh Biro Keuangan. Untuk tahun 2023, penyerapan anggaran Biro Keuangan pada Program Dukungan Manajemen (Dukman) mencapai 95,43 persen.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan tahun anggaran 2023. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat yang berfungsi sebagai alat penilaian serta kendali atas pelaksanaan kegiatan dan sebagai bahan masukan pimpinan dalam pengambilan keputusan.

Secara umum tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan Biro Keuangan Tahun 2023 dapat dilaksanakan secara optimal dengan capaian kinerja mencapai 101,34 persen. Dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan, capaian sasaran utama dari indikator *outcome* Biro Keuangan untuk mendukung sasaran program Sekretariat Utama BPS terkait "Meningkatnya Tata Kelola Penggunaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan" untuk tahun 2023, bisa terlihat pada opini BPK-RI atas Laporan Keuangan BPS Tahun Anggaran 2023. Laporan Keuangan BPS Tahun Anggaran 2023 mendapat opini WTP dari BPK. BPS mampu mempertahankan opini WTP sejak tahun 2016.

Namun, hasil yang diperoleh harus tetap perlu dievaluasi untuk mendapatkan umpan balik dalam perencanaan kegiatan Biro Keuangan pada waktu yang akan datang. Adapun pencapaian penyerapan anggaran Biro Keuangan sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 mencapai 95,43 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dengan periode yang sama yang mencapai 99,55 persen di tahun 2022. Penurunan pencapaian penyerapan anggaran terjadi pada semua komponen POK di Biro Keuangan. Hal ini disebabkan oleh adanya *Automatic Adjustment* yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan di Biro Keuangan. Beberapa kegiatan harus dihentikan dan sebagian lainnya harus mengalami penyesuaian dari sisi perencanaan.

4.2 Tindak Lanjut

Dari capaian kinerja yang sudah diraih Biro Keuangan BPS pada tahun 2023, tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk kedepannya yaitu lebih meningkatkan pelayanan di bidang keuangan sehingga bisa lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil evaluasi dari beberapa aspek yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya maka terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja Biro Keuangan BPS pada tahun 2023. Beberapa hal tersebut dituangkan dalam kegiatan sehingga aspek pencapaiannya dalam pemenuhan di masa yang akan datang dapat lebih ditingkatkan, antara lain:

1. Sebagai arah perubahan jabatan di Biro Keuangan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional, perlu diperbanyaknya peningkatan kompetensi/pelatihan/diklat keuangan, pemberian kesempatan belajar di sektor keuangan, atau perbanyak pegawai lulusan rumpun pendidikan keuangan di biro keuangan untuk mengisi formasi yang ada. Selain itu, perlu dilakukan komunikasi dengan lembaga pembina jabatan fungsional perbendaharaan (Kementerian Keuangan) mengenai penambahan butir-butir

pekerjaan pada Biro Keuangan BPS ke butir-butir pekerjaan jabatan fungsional perbendaharaan.

2. Perlu dilakukan perbaikan dalam proses perencanaan pelaksanaan kegiatan. Sebisa mungkin pelaksanaan kegiatan-kegiatan harus disesuaikan dengan jadwal yang sudah disusun sebelumnya. Penyusunan Rencana Aksi yang sudah dilakukan perlu dilanjutkan, namun harus ada kerja sama dan koordinasi dari semua unit di Biro Keuangan, sehingga tidak ada sasaran kegiatan yang tumpang tindih atau bentrok jadwal pelaksanaannya. Adapun rencana kerja yang sudah disusun ini harus siap untuk disesuaikan setiap saat, bilamana memang muncul perubahan prioritas pekerjaan.
3. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan di internal Biro Keuangan untuk segera bisa mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan menyusun rencana tindak yang tepat. Jika memang ada perubahan prioritas pelaksanaan kegiatan, maka penjadwalan ulang semua kegiatan harus dilakukan dengan segera, sehingga semua target capaian kinerja bisa dipenuhi.
4. Koordinasi yang berkesinambungan dengan pihak-pihak internal maupun eksternal yang terkait dengan tugas dan fungsi Biro Keuangan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target yang telah ditetapkan.
5. Kegiatan yang telah berjalan dengan baik harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan prestasinya untuk tahun-tahun yang akan datang.
6. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait perlunya pembinaan terhadap seluruh satker di lingkup Badan Pusat Statistik tentang pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan adanya pembinaan baik secara offline maupun online dengan koordinator satker di provinsi, kabupaten dan kota.
7. Tindak lanjut atas penilaian SAKIP Biro Keuangan 2022 telah dilaksanakan dan diperbaiki pada tahun 2023.

Pada akhirnya, diharapkan LAKIP Biro Keuangan ini akan memberikan gambaran riil atas pencapaian kinerja Biro Keuangan dalam pelaksanaan anggaran pada tahun 2023. Semoga hasil evaluasi yang dituangkan dalam LAKIP ini dapat berguna sebagai umpan balik dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Biro Keuangan untuk tahun-tahun yang akan datang.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO KEUANGAN
BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darusman S.Si, MM.
Jabatan : Kepala Biro Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Atqo Mardiyanto M.Si.
Jabatan : Sekretaris Utama
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ir. Atqo Mardiyanto M.Si.
NIP. 19640508 198702 1 002

Jakarta, 30 Januari 2024
Pihak Pertama

Darusman S.Si, MM.
NIP. 19720727 199412 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO KEUANGAN**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Menyelenggarakan Layanan Administrasi Keuangan			
Terwujudnya layanan administrasi keuangan yang efektif dan efisien	Persentase Produk Layanan Administrasi Keuangan yang terselesaikan (%)	Persen	98,59
Tujuan 2. Mempertanggungjawabkan keuangan secara akuntabel, efektif dan efisien			
Terwujudnya layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien	Persentase pertanggungjawaban keuangan yang diterbitkan tepat waktu (%)	Persen	100,00
Tujuan 3. Menyelenggarakan proses verifikasi keuangan			
Terselenggaranya proses verifikasi yang transparan	Persentase Hasil Verifikasi Keuangan yang terbit sesuai standar aturan kementerian keuangan (%)	Persen	98,82
Tujuan 4. Menyusun dan menerbitkan Laporan keuangan			
Terwujud laporan keuangan yang berkualitas	Opini laporan keuangan BPS oleh BPK	Skor	100,00
	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu (%)	Persen	100,00

Kegiatan

Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan

Anggaran

Rp. 302.687.086.000,-

Jakarta, 30 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Ir. Atgo Mardiyanto M.Si.
NIP. 19640508 198702 1 002

Darusman S.Si, MM.
NIP. 19720727 199412 1 001

**PERJANJIAN KINERJA SUPLEMEN TAHUN 2024
BIRO KEUANGAN**

Tujuan/Sasaran Strategis Kepala BPS	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Nilai Maturitas SPIP	Poin	3,00
	Nilai SAKIP Unit Kerja	Poin	75,00
	Indikator aspek kualitas pelaksanaan anggaran	Nilai	88,00
	Indikator aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran	Nilai	100,00

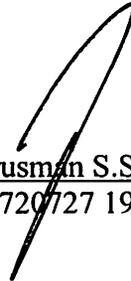
Pihak Kedua



Ir. Atqo Mardiyanto M.Si.
NIP. 19640508 198702 1 002

Jakarta, 30 Januari 2024

Pihak Pertama



Darusman S.Si, MM.
NIP. 19720727 199412 1 001

SEKRETARIAT UTAMA

Biro Keuangan

Indikator Kinerja/Uraian	Target	Satuan	Alokasi Target (Kumulatif)				Realisasi (Kumulatif)				Capaian Kinerja							
											Terhadap Target Triwulanan			Terhadap Target Setahun				
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
CAPAIAN KINERJA PK/IKU																		
Identitas Sasaran eselon 2 :																		
Kode Program	WA Program Dukungan Manajemen																	
Kode Kegiatan	2884 Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan																	
Kode Tujuan eselon 2	01 Menyelenggarakan Layanan Administrasi Keuangan																	
Sasaran	01 Terwujudnya Layanan Administrasi keuangan yang efektif dan efisien																	
	95	Persen	91	92	94	95	90.56	97.48	97.90	98.59	99.51648	105.9565217	104.1489362	95.32631579	102.6105263	103.0526316	103.77894	
	Presentase Produk Layanan Administrasi Keuangan yang terselesaikan																	
Kode Tujuan eselon 2	02 Mempertanggungjawabkan keuangan secara akuntabel, efektif dan efisien																	
Sasaran	02 Terwujudnya layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien																	
	100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase pertanggungjawaban keuangan yang diterbitkan tepat waktu																	
Kode Tujuan eselon 2	03 Menyelenggarakan proses verifikasi keuangan																	
Sasaran	03 Terselenggaranya proses verifikasi yang Transparan																	
	96	Persen	96	96	96	96	99.28	98.66	98.01	98.82	103.4166	102.7708333	102.09375	103.4166667	102.7708333	102.09375	102.9375	
	Persentase Hasil Verifikasi Keuangan yang terbit sesuai standar aturan kementerian keuangan																	
Kode Tujuan eselon 2	04 Menyusun dan menerbitkan Laporan keuangan																	
Sasaran	04 Terwujud laporan keuangan yang berkualitas																	
	WTP	Skor	0	100	100	100	0	100	100	100	0	100	100	0	100	100	100	
	Opini laporan keuangan BPS oleh BPK																	
	100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu																	
											Rata rata Capaian Kinerja :							
											100.73	101.75	101.25	79.75	101.08	101.03	101.34	
Tambahan																		
IKU Sestama	Persentase rekomendasi hasil reviu Inspektorat Utama terhadap Laporan Keuangan BPS yang ditindaklanjuti																	
	100	Persen	100	100	100	100	75	100	100	100	75	100	100	75	100	100	100	

Analisis Pencapaian Kinerja di Triwulan Berjalan				
Kendala	Solusi	Tindak Lanjut	PIC Tindak Lanjut	Batas Waktu Tindak Lanjut
(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Keterlambatan penyampaian SK perubahan gaji pegawai dari Biro SDM	Koordinasi dengan Biro SDM	Upload Dokumen SK pegawai ke SIMOKA	Kurniawan Kirmantono	3 Hari
Kekurangan dokumen pendukung dari subject matter terkait sehingga menghambat proses pembuatan SPP	Koordinasi dengan subject matter terkait untuk menindaklanjuti kekurangan dokumen tersebut	Terpenuhinya dokumen pendukung dari subject matter	Aries Candraswana	3 Hari
SPP yang belum layak untuk diterbitkan SPM seperti kekurangan dokumen pendukung, kesalahan dalam perhitungan, dan belum ditandatangani oleh pejabat berwenang.	Menerbitkan kertas kerja permasalahan, Koordinasi dengan PPK dan BPP	Para pihak harus segera menyelesaikan perbaikan.	M. Ali Asy'ari	3 Hari
Terdapat ketidaksesuaian pencatatan pada satker, sehingga koreksi pencatatan harus dilakukan	Berkoordinasi dengan kementerian keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan guna mengusulkan jurnal koreksi audit	Mengoordinasi dan memonitoring penginputan jurnal koreksi audit pada aplikasi MonSAKTI yang di lakukan oleh satker	Budi Prayoga	Desember
Masih ditemukan kesalahan dalam pencatatan dan kurang mempersiapkan dokumen sumber, akibat dari proses penyesuaian dengan sistem aplikasi baru yakni SAKTI dan MonSAKTI	Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pihak internal dan eksternal mengenai koreksi pencatatan dan dokumen sumber	1. Memberikan masukan dan arahan terkait proses penyusunan LK oleh Biro Keuangan 2. Melakukan koordinasi dengan pembina BPS pada Kementerian Keuangan dalam hal ini adalah Dit. APK	Budi Prayoga	Desember
Satker belum memahami secara menyeluruh mengenai hasil reviu Inspektorat Utama terhadap Laporan Keuangan BPS	Memberikan pemahaman kepada satker berkaitan dengan hasil reviu Inspektorat Utama terhadap Laporan Keuangan BPS	Satker telah menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Utama terhadap Laporan Keuangan BPS	Biro Keuangan	Oktober

Dokumentasi Pembahasan Capaian Kinerja Tahun 2023



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia

Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291, Faks (62-21) 3857046,

Homepage: <https://bps.go.id/> Mailbox: bpshq@bps.go.id